

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE BUSINESS SYARIAH*
TERHADAP *ISLAMIC FINANCIAL PERFORMANCE INDEX*
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh :

NURUL INTAN SYARI

Npm: 1551030069

Jurusan: Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah)



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE BUSINESS SYARIAH*
TERHADAP *ISLAMIC FINANCIAL PERORMANCE INDEX*
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan
Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

Nurul Intan Syari

NPM :1551030069

Jurusan : Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah)

Pembimbing I : Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.Si.

Pembimbing II : Liya Ermawati, S.E.,M.S.Ak.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

ABSTRAK

Perbankan Syariah yang semakin berkembang memiliki banyak tantangan yaitu ketatnya persaingan dalam penghimpunan dana pihak ketiga antar Lembaga Keuangan Bank maupun non Bank. Untuk mewujudkan kepercayaan kepada masyarakat dan stakeholder Perbankan Syariah haruslah dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan islam yang tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan saja melainkan adalah seluruh kegiatannya yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah penerapan *Good Governace Business Syariah* berpengaruh terhadap kinerja keuangan syariah yaitu dengan menggunakan *Islamic Financial Performance Index* pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2013-2018.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *Good Governace Business Syariah* terhadap *Islamic Financial Performance Index* Bank Umum Syariah di Indonesia. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Islamic Financial Performance Index*. Variabel dependen yang digunakan adalah *Good Governace Business Syariah*.

Penelitian ini didukung oleh *Sharia Enterprise Theory* dan Teori *Stakeholder* yang menjelaskan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap para pemegang saham dan semua kepentingan perusahaan serta mencapai tujuan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif, data yang digunakan merupakan data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan dan laporan GCG tahunan yang diperoleh dari masing-masing perusahaan yang telah dipublikasikan. Sampel penelitian adalah Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2013-2018. Sampel yang dipilih menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 6 BUS dengan laporan keuangan selama 6 tahun. Indikator variabel *Good Governace Business Syariah* diukur dengan menggunakan indeks GGBS dan variabel *Islamic Financial Performance Index* diukur dengan menggunakan *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, *Equitabel Distribution Ratio*, dan *Islamic Income Vs Non-Islamic Income*. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji T dan koefisien determinasi *Adjusted R²*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Governace Business Syariah* berpengaruh signifikan terhadap *Islamic Income Vs Non-Islamic Income* dengan nilai signifikansi $0,027 < 0,05$. Sedangkan, *Good Governace Business Syariah* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Profit Sharing Ratio*, *Zakat Performance Ratio*, dan *Equitabel Distribution Ratio*.

Kata Kunci : *Good Governace Business Syariah, Islamic Financial Performance Index, Bank Umum Syariah.*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Intan Syari
NPM : 1551030069
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerapan *Good Governance Business Syariah* terhadap *Islamic Financial Performance Indek Bank Umum Syariah di Indonesia*”** benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, buka duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Bandar Lampung, 29 Oktober 2019
Penulis,

Nurul Intan Syari



KEMENTRIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
BUSINESS SYARIAH TERHADAP ISLAMIC FINANCIAL
PERFORMANCE INDEX BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA**


Nama : **Nurul Intan Syari**
NPM : **1551030069**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung


Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I
NIP. 198008012003121001


Liva Ermawati, S.E., M.S.Ak.
NIP. 198903072019032020

Mengetahui
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah


Madnasir, S.E., M.S.I
NIP. 197504242002121001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmen Sukarame Bandar Lampung 35131 telp (0721) 704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE
BUSINESS SYARIAH TERHADAP ISLAMIC FINANCIAL
PERFORMANCE INDEX BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA”**

disusun oleh: **Nurul Intan Syari, NPM 1551030069**, Program Studi **Ekonomi
Syariah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam UIN Raden Intan pada: Hari/Tanggal: Selasa, 26 November 2019. Waktu:
15.00-16.30 WIB, Ruangan: Dekanat FEBI Lantai 2 Ruang Sidang 3.

TIM PENGUJI

Ketua : Syamsul Hilal, M.Ag.

Sekretaris : Yulistia Devi, S.E.,M.S.Ak.

Penguji I : Dr. H. Nasruddin, M.Ag.

Penguji II : Liya Ermawati, S.E.,M.S.Ak.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Ruslan Abdi Ghofur, M.S.I

NIP. 195008012003121001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
قَوْمٍ ءَلَىٰ ءَلَا تَعْدِلُوا ۖ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا
تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al Maidah :8).



PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah memberikan segalanya kepada penulis sehingga bisa terselesaikan skripsi ini.

Skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh cinta kepada:

1. Kedua orang tua Ayah Dedi Solihin dan Ibu Erliwati yang tersayang. Tiada kata-kata yang bisa diungkapkan selain terimakasih atas kasih sayang, do'a, dan dukungannya yang telah merawat, membesarkan dan memberikan pengajaran hidup yang luar biasa dengan sepenuh hati. Dan selalu memberikan segala hal yang berguna demi terwujudnya keberhasilan ini. Tiada hal yang bisa dilakukan untuk membalas semua pengorbanan ayah dan ibu, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT dan diberikan keberkahan dalam setiap langkahnya.
2. Uda Deri Eko Irawan dan Ayuk Septia Anggraini, serta Adik ku tercinta Putri Riskia Fadela terimakasih untuk nasehat, dukungan dan perhatian yang telah kalian berikan.
3. Sahabat kosan Dewi Wahyuni S, Yuniati, Sinta Gusti Y, Tika Meida P, Ana Mariana, dan Khusnul Khotimah terimakasih atas kebersamaan yang telah dilalui, memberikan solusi, saran serta hiburan disaat sedang mengalami kesulitan, terimakasih.
4. Untuk seseorang yang tidak bisa ku sebutkan namanya, terimakasih telah mengajarkan sabar dan selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

5. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Way Kanan pada tanggal 24 Februari 1998. Anak ke 2 dari 3 bersaudara, pasangan Ayah Dedi Solihin dan Ibu Erliwati.

Pendidikan dimulai dari TK Cangkorah Bandung selesai pada tahun 2002. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Baradatu selesai pada tahun 2009. Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 03 Baradatu selesai pada tahun 2012. Madrasah Aliyah (MA) Masyariqul Anwar Durian Payung, Tanjung Karang selesai pada tahun 2015.

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT serta berkat dukungan Ayah, Ibu dan keluarga, akhirnya penulis memiliki kesempatan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung pada tahun 2015.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, serta anugerah yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang telah memberikan contoh akhlakul kharimah bagi seluruh muslim di seluruh dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi Progran Ekonomi Syariah (Konsentrasi Akuntansi Syariah) S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, dengan judul: “pengaruh penerapan *Good Governance Business Syariah* terhadap *Islamic Financial Performance Index Bank* Umum Syariah di Indonesia”.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari bahwa ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan, maka dari itu kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta jajarannya.
2. Bapak Madnasir, S.E., M.Si., selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Ibu Any Eliza, M.Ak., selaku Ketua Prodi Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

4. Bapak Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I., selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan.
5. Ibu Liya Ermawati, S.E., M.S.Ak., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan member masukan-masukan dan saran-saran serta motivasi kepada penulis.
6. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
7. Seluruh Staf Administrasi dan karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan bantuannya kepada penulis.
8. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah khususnya Akuntansi A angkatan 2015. Terimakasih atas segala bentuk bantuan kalian dan motivasinya selama ini. Semoga kita menjadi alumni yang bermanfaat bagi Agama, Nusa dan Bangsa. Semoga Allah SWT melimpahkan rahma dan karunia-Nya serta membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN 65 desa Tanjung Harapan terimakasih atas kebersamaan dan kekeluargaan yang terjalin selama ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Akhir kata jika penulis ada kesalahan dan kekeliruan

dalam penulisan skripsi ini penulis mohon maaf dan kepada Allah mohon ampun dan perlindungan-Nya. Semoga karya ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 21 Oktober 2019
Penulis

Nurul Intan Syari
NPM. 1551020069



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami istilah-istilah yang ada dalam judul ini, maka secara singkat penulis terlebih dahulu akan menjelaskan dan menguraikan maksud dari judul ini. Adapun judul yang dibahas adalah “Pengaruh Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamic Financial Performance Index* Bank Umum Syariah di Indonesia” pada bagian ini penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini.

Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (benda, orang) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹

Penerapan adalah perbuatan menerapkan.² Sedangkan menurut para ahli penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 2011), h. 1045.

²*Ibid.* h. 1598.

Good Governance Business Syariah (GGBS) adalah kemampuan untuk menjaga keberlangsungan bisnis sangat penting untuk dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.³

Islamic Performance Index merupakan alat pengukuran kinerja keuangan Islam, yang tidak hanya mampu mengungkapkan nilai-nilai materialistis dari Bank Syariah, namun juga nilai-nilai kesyariahan yang ada di dalam Bank Syariah.⁴

Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, atau dengan kata lain yaitu bank yang tata beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan islam.⁵

Berdasarkan definisi dari beberapa kalimat diatas, maka yang dimaksud dengan “Pengaruh Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamic Financial Performance Index* Bank Umum Syariah Di Indonesia” adalah apakah penerapan *Good Governance Business Syariah* mempengaruhi kinerja keuangan Bank Umum Syariah berdasarkan beberapa rasio yang terdapat dalam *Islamic Performance Index*.

³Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Business Syariah* (Jakarta, 2011).

⁴Oktaviani Rita Puspasari, “Mekanisme *Islamic Corporate Governance* Pada Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan *Islamic Performance Index*”. (Jurnal Universitas Kuningan, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2017), h.45-58.

⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 61.

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

Bank Syariah semakin berkembang sangat pesat, dibalik pesatnya perkembangan perbankan syariah menghadapi banyak tantangan salah satunya adalah ketatnya persaingan dalam penghimpunan dana pihak ketiga antar Lembaga Keuangan Bank maupun non Bank. Untuk menjawab tantangan tersebut, perbankan syariah mewujudkan kepercayaan kepada *stakeholder* baik dalam sisi kinerja keuangan (*financial performance*) atau pun kinerja islami. Dengan menerapkan *Good Governance Business Syariah* yang didalamnya sudah terdapat prinsip-prinsip syariah seperti keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran dan kesetaraan. Dan menggunakan pendekatan *Islamic Performance Index* memiliki indikator berupa rasio-rasio yang mampu mengungkapkan nilai-nilai kesyariahan yang terdapat dalam kinerja Bank Umum Syariah.

2. Alasan Subjektif

Peneliti optimis bahwa penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini didukung oleh tersedianya data-data dan berbagai *literature* yang dibutuhkan dalam penelitian sebagai referensi. Berupa laporan keuangan BUS yang tersedia pada website Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan.

C. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia semakin maju setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan

Syariah. Perkembangan tersebut terlihat dari jumlah bank maupun jumlah kantor baik Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Hal ini dapat dilihat dalam tabel perkembangan perbankan syariah yang dilaporkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Tabel 1.1

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

Indikator	Tahun					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Bank Umum Syariah	11	12	12	13	13	14
Unit Usaha Syariah	23	22	22	21	21	20
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah	163	163	163	166	167	167

Sumber: OJK, Statistik Perbankan Syariah, 2018

Semakin banyaknya jumlah bank syariah yang beroperasi di Indonesia, baik dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan berbagai bentuk produk dan pelayanan yang diberikan dapat menimbulkan permasalahan di masyarakat. Permasalahan yang paling penting adalah apakah perbankan syariah sudah menjalankan bisnis sesuai prinsip syariah dan bagaimana kualitas kinerja bank syariah yang ada. Bank syariah haruslah dapat memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat dan peran dan tanggung jawab bank syariah selaku lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak, tetapi yang paling penting adalah kepastian seluruh kegiatan yang dijalankan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Bank Indonesia menyampaikan bahwa penerapan prinsip syariah dapat dibangun dengan penerapan *Good Governance Bisnis Syariah* (GGBS) yang telah diatur dalam Pedoman Umum yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2011. Bank Indonesia menyampaikan pelaksanaan bank syariah tidak hanya dapat dilaksanakan dengan prinsip syariah namun juga dengan ketentuan-ketentuan syariah. Bank Indonesia dengan ini menerbitkan pelaksanaan GCG Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah pada Peraturan Bank Indonesia No 11/33/PBI/2009 dan SE BI No. 12/13/DPbs tanggal 30 April 2010.⁶

Pada dasarnya penerapan GCG di bank syariah dan konvensional menggunakan prinsip yang sama yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran. Penerapan GCG di bank syariah harus memenuhi kepatuhan pada prinsip syariah (*sharia compliance*). Penerapan *Good Corporate Governance* dalam lembaga keuangan syariah menjadi penting untuk dilakukan agar semakin menumbuhkan kepercayaan dalam masyarakat dan meningkatkan kinerja serta kemajuan perbankan syariah. Pelaksanaan GCG dalam tubuh institusi syariah adalah penting guna perkembangan perbankan syariah kearah yang lebih maju.

Sebagaimana dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 bahwa prinsip-prinsip dalam GCG harus menerapkan prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), profesional (*professional*), kewajaran (*fairness*), dan pertanggung jawaban (*responsibility*).

⁶Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Business Syariah* (Jakarta, 2011).

Selain itu prinsip dasar pelaksanaan GCC ini juga dijelaskan dalam pedoman *Good Governance Business Syariah* (GGBS) yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

Tanpa adanya penerapan *Corporate Governance* yang efektif, bank syariah tidak akan bisa memperkuat posisi, memperluas jaringan, dan menunjukkan kinerjanya dengan lebih efektif. Kebutuhan bank syariah akan *Corporate Governance* menjadi lebih serius lagi seiring dengan makin kompleksnya masalah yang dihadapi, dimana permasalahan ini akan mengikis kemampuan bank untuk dalam menghadapi tantangan dalam jangka panjang. Dengan demikian, adalah suatu keharusan bagi bank syariah untuk memakai semua ukuran yang dapat membantu meningkatkan perannya.⁷

Ide pedoman umum GGBS menjadi tolak ukur perubahan bagi budaya kerja di bank syariah sendiri dan pencapaian penerapan GGBS di bank syariah di Indonesia melalui indeks penerapan GGBS yang meliputi ketersediaan organ sesuai dengan prinsip-prinsip GGBS dan bagaimana kinerja organ-organ tersebut.

Penilaian terhadap kinerja lembaga keuangan syariah sama pentingnya dengan mengukur pencapaian dari aktivitas individual. Hal ini sesuai dengan peran dan tanggung jawab dari lembaga keuangan syariah yang tidak hanya dibatasi pada pencapaian kebutuhan informasi keuangan dari para stakeholder, namun juga terhadap aktivitas yang dilakukan oleh institusi dalam hal ini tentang konsistensinya dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah. Oleh sebab

⁷Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.13.

itu, kepercayaan publik dalam hal ini sebagai shareholder pada khususnya maupun *stakeholder* pada umumnya ditentukan dari hasil kinerja yang dilakukan. Kinerja perusahaan dapat dilihat melalui laporan keuangan yang dibuat setiap periode. Analisis laporan keuangan bank syariah dalam hal ini yang dilakukan dengan menggunakan *islamicity financial performance index*. Indeks ini memberikan manfaat untuk membantu *stakeholder* yaitu deposan, pemegang saham, badan keagamaan, pemerintah dan lainnya untuk mengevaluasi kinerja lembaga keuangan Islam.⁸

Penggunaan indikator *Islamic Performance Index* merupakan alat pengukuran kinerja yang dapat menunjukan nilai materialitas serta nilai spiritual dari bank Islam. Pengukuran kinerja dalam bank umum syariah yang menggunakan *islamicity financial performance index* memiliki beberapa indikator, yaitu diantaranya adalah *profit sharing ratio*, *zakat performance ratio*, *equitable distribution ratio*, *directors-employees welfare ratio*, *islamic invesment vs non-islamic investment*, *islamic income vs non islamic income*, *AAIOIFI index (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions)*.⁹

Berdasarkan latar belakang maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah **“Pengaruh Penerapan *Good Governance* Bisnis**

⁸Ayu Widiastuti dan Mulyaning Wulan, “*Good Governance Bisnis Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah*”. (Jurnal Universitas Muhamadiyah, Vol.1 No.1 (Maret 2017), h.94-133.

⁹Sebtianita, E, *Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index (Studi Pada Bank Umum Syariah periode tahun 2009-2013)*. Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Malang, (April 2015), h. 3.

Syariah terhadap Islamic Financial Performance Index Bank Umum Syariah di Indonesia”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas untuk memperjelas arah penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *Good Governanve Business Syariah* berpengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia?
2. Apakah penerapan *Good Governanve Business Syariah* berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia?
3. Apakah penerapan *Good Governanve Business Syariah* berpengaruh terhadap *Equitabel Distribution Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia?
4. Apakah penerapan *Good Governanve Business Syariah* berpengaruh terhadap *Islamic Income Vs Non-Islamic Income Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Untuk mengetahui penerapan *Good Governance Business Syariah* terhadap *Islamic Financial Performance Index*.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan keilmuan dan pemahaman terhadap konsep pengukuran kinerja bank syariah
- b. Bagi akademisi, dapat berguna sebagai referensi bagi pihak yang membutuhkan dan untuk melakukan penelitian lanjutan.

- c. Bagi praktisi, perbankan syariah dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menerapkan *Good Governance Business Syariah* pada perbankan syariah.

F. Batasan Penelitian

Penulis membatasi masalah yang diteliti, yaitu mengukur kinerja keuangan Bank Umum Syariah dengan menggunakan *Islamic Performance Index*. Sampel dalam penelitian adalah Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan keuangan dan informasi lain tahun 2013-2018.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Sharia Enterprise Theory

Sharia Enterprise Theory merupakan suatu konsep teori yang menjelaskan bahwa tanggung jawab perusahaan tidak hanya terhadap para pemilik perusahaan melainkan terhadap keseluruhan stakeholder yang berkaitan dengan perusahaan. Para pemangku kepentingan menurut pandangan SET meliputi Allah, manusia dan alam. Peranan teori ini pada kegiatan perbankan syariah diharapkan dapat membuat kinerja bank lebih baik, perilaku manajemen akan lebih termotivasi untuk mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan sebagaimana tanggung jawabnya terhadap keseluruhan *stakeholder*.

Semakin tinggi tingkat kepatuhan syariah dan penerapan *Good Corporate Business Syariah* dalam menerapkan prinsip tersebut memungkinkan bank untuk mendapatkan katagori sebagai bank sehat. Bank umum syariah juga akan lebih mawas diri dan bijak dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalisir tindak kecurangan yang mungkin dilakukan. Penerapan prinsip *syariah enterprise theory* bank umum syariah harus memberikan informasi yang akurat dan transparan, sehingga pemilik modal yakin terhadap kebenaran informasi laporan keuangan yang di terbitkan oleh pihak bank umum syariah.¹⁰

¹⁰Oktaviani Rita Puspasari, “Mekanisme *Islamic Corporate Governance* Pada Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan *Islamic Performance Index*”,, h.48.

B. Teori *Stakeholder*

Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri, dan untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder perusahaan harus memberikan manfaat bagi para stakeholdernya. *Stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. *Stakeholder* dapat dibagi menjadi dua berdasarkan karakteristiknya yaitu *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder. *Stakeholder* primer adalah seseorang atau kelompok yang tanpanya perusahaan tidak dapat bertahan untuk *going concern*, meliputi: *shareholder* dan investor, karyawan, konsumen dan pemasok, bersama dengan yang didefinisikan sebagai kelompok *stakeholder* publik, yaitu: pemerintah dan komunitas. Kelompok *stakeholder* sekunder didefinisikan sebagai mereka yang mempengaruhi, atau dipengaruhi perusahaan, namun mereka tidak berhubungan dengan transaksi dengan perusahaan dan tidak esensial kelangsungannya. Dari dua jenis *stakeholder* diatas, *stakeholder* primer adalah *stakeholder* yang paling berpengaruh bagi kelangsungan perusahaan karena mempunyai *power* yang cukup tinggi terhadap ketersediaan sumber daya perusahaan.¹¹

¹¹Sayekti Endah Retno Meilani, "Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah Di Indonesia*". (Surakarta: Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015), h.

Dalam teori *stakeholder* posisi para *stakeholder* dipertimbangkan sebagai pihak yang paling memiliki kekuatan dalam perusahaan, sehingga pertimbangan utama bagi perusahaan dalam memutuskan untuk mengungkapkan atau tidak suatu informasi dalam laporan keuangan adalah *stakeholder*. Teori *stakeholder* menekankan akuntabilitas organisasi jauh melebihi kinerja keuangan atau ekonomi sederhana. Teori ini menyatakan bahwa organisasi akan memilih secara sukarela mengungkapkan informasi tentang kinerja lingkungan, sosial dan intelektual mereka, melebihi dan di atas permintaan wajibnya, untuk memenuhi ekspektasi sesungguhnya atau yang diakui oleh *stakeholder*. *Stakeholder* memiliki hak untuk diberi informasi bagaimana dampak aktivitas perusahaan bagi mereka meskipun akhirnya nanti mereka memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut, atau tidak dapat memainkan peran konstruktif di dalam kelangsungan hidup perusahaan. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajer korporasi mengerti lingkungan *stakeholder* mereka dan melakukan pengelolaan dengan lebih efektif di antara keberadaan hubungan-hubungan di lingkungan perusahaan mereka. Namun demikian, tujuan yang lebih luas dari teori *stakeholder* adalah untuk menolong manajer korporasi dalam meningkatkan nilai dari dampak aktifitas-aktifitas mereka, dan meminimalkan kerugian-kerugian bagi *stakeholder*. Pada kenyataannya, inti keseluruhan teori *stakeholder* terletak pada apa yang akan terjadi ketika korporasi dan *stakeholder* menjalankan hubungan mereka.¹²

¹²Ghozali, I dan A. Chariri Teori Akuntansi (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006), h. 14.

Teori *Stakeholder* juga menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada para pemegang saham, tetapi juga harus bertanggung jawab kepada kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan dalam tindakan perusahaan atau yang dikenal dengan istilah *stakeholder*. Konsep *corporate governance* dibentuk untuk meningkatkan kinerja perusahaan melalui *supervise* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder*. Konsep ini bertujuan agar tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan. Sehingga pelaksanaan dan pelaporan *Corporate Governance* menjadi sesuatu yang sangat penting bagi semua *stakeholders*.¹³

C. Bank Syariah

Menurut UU Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang perbankan: Bank adalah usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Namun, ditinjau dari sudut pandang hukum, ruang lingkup pengertian perbankan itu masih bersifat umum sehingga belum sampai pada kesimpulan apakah jenis kegiatan usaha yang dilakukan di lembaga perbankan tersebut halal atau haram. Karena itu untuk menjamin kehalalan kegiatan usaha perbankan, maka dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian lembaga perbankan yang kegiatan

¹³Refki Febri Arieza dan Peni Nugraheni, *Pengaruh Penerapan Good Governance Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Komparasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2012-2015)*. Yogyakarta: Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, h.5.

usahanya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka dapat dikatakan sebagai perbankan syariah.¹⁴

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah implementasi yang sesuai dengan paradigma dan asas syariah harus memenuhi karakteristik dan persyaratan sebagai berikut :

1. Transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridha.
2. Prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik (thayib).
3. Uang hanya berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas.
4. Tidak mengandung unsur riba.
5. Tidak mengandung unsur kezaliman.
6. Tidak mengandung unsur maysir.
7. Tidak mengandung unsur gharar.
8. Tidak mengandung unsur haram.
9. Tidak menganut prinsip nilai waktu dari uang (time value of money) karena keuntungan yang didapat dalam kegiatan usaha terkait dengan risiko yang melekat pada kegiatan usaha tersebut sesuai dengan prinsip al-ghunmu bil ghurmi (*no gain without accompanying risk*).
10. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian yang jelas dan benar serta untuk keuntungan semua pihak tanpa merugikan pihak lain sehingga tidak

¹⁴Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h. 25.

diperkenankan menggunakan standar ganda harga untuk satu akad serta tidak menggunakan dua transaksi bersamaan yang berkaitan (ta'alluq) dalam satu akad.

11. Tidak ada distorsi harga melalui rekayasa permintaan (najasy), maupun melalui rekayasa penawaran (ihtikar).
12. Tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap (risywah).

Islam mengajarkan segala sesuatu yang baik dan memberikan manfaat bagi manusia, sehingga Islam juga disebut sebagai agama fitrah atau yang sesuai dengan sifat dasar manusia. Aktivitas keuangan dan perbankan merupakan suatu sarana yang setidaknya dapat membawa manusia dalam dua ajaran dalam Al-Qur'an. Prinsip yang pertama adalah prinsip Al-Ta'awun yakni prinsip untuk saling membantu dan bekerjasama antara umat manusia dalam kebaikan. Prinsip yang kedua adalah prinsip menghindari Al-Ikhtinaz yakni membiarkan uang tidak bergerak dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.¹⁵

Tabel 2.1
Perbedaan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional

No	Uraian	Bank Konvensional	Bank Syariah
1	Landasan Operasional	a) Prinsip materialisme (bebas nilai). b) Komoditi yang diperdagangkan adalah uang. c) Instrument imbalan terhadap pemilik uang ditetapkan dimuka menggunakan bunga.	a) Prinsip syariah (tidak bebas nilai). b) Uang hanya sebagai alat tukar. c) Dilarang menggunakan sistem bunga. d) Menggunakan cara bagaimana hasil dari keuntungan jasa atas

¹⁵ Antonio, M.S, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 185.

			transaksi riil
2	Peran dan Fungsi Bank	a) Sebagai penghimpun dana masyarakat dan meminjamkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dengan imbalan bunga. b) Sebagai penyedia jasa pembayaran. c) Menerapkan hubungan debitur dan sebaliknya. Antara pendapatan bunga dengan beban bunga dimungkinkan terjadi selisih negatif.	a) Sebagai penerima dana titipan nasabah. b) Sebagai manajer investasi. c) Sebagai investor. d) Sebagai penyedia jasa pembayaran dan tidak bertantangan dengan syariah. e) Sebagai pengelola dan kebajikan ZIS. f) Menerapkan hubungan kemitraan (investor timbale balik pengelola investasi).
3	Resiko Usaha	Resiko bank tidak ada kaitannya dengan resiko debitur dan sebaliknya. Antara pendapatan bunga dengan beban bunga dimungkinkan terjadi selisih negatif.	Dihadapi bersama antara bank dan nasabah. Tidak mengenal <i>negative spread</i> (selisi negatif).
4	Sistem Pengawasan	Tidak ada nilai-nilai religious yang mendasari operasional sehingga aspek moralitas seringkali dilanggar.	Ada dewan pengawas syariah, sehingga operasional bank syariah tidak menyimpang dari syariah.

Sumber: Dimas, (2011)

Dari tabel diatas disimpulkan bahwa ada kekhasan pada beberapa sisi yang dimiliki bank syariah yang menjadi pembeda dengan perbankan konvensional maupun lembaga keuangan dan perusahaan pada umumnya. Lembaga-lembaga Islam seperti bank syariah di sisi lain setidaknya secara teoretis merupakan perwujudan dari sistem ekonomi Islam yang didirikan untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi kusus yang sejalan dengan gagasan membangun keadilan. Dengan perbedaan dan kekhasan tersebut maka akan

diperlukan cara yang berbeda dengan bank konvensional dalam mengukur kinerja agar lebih sesuai dan sejalan dengan tujuan pengembangan lembaga syariah.¹⁶

Di Indonesia, regulasi mengenai bank syariah tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

1. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer keluar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit*, dan sebagainya.¹⁷
2. Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.

¹⁶Dimas Nurdy Prasetya, *Analisis Pengaruh Intellectual Capital terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia*. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), h. 20.

¹⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009),, h. 61.

UUS berada satu tingkat bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa.

3. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan antara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.¹⁸

D. Good Governance Business Syariah

1. Definisi Good Governance Business Syariah

Corporate governance merupakan seperangkat aturan yang merumuskan hubungan antara para pemegang saham, manager, kreditor, pemerintah, karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya baik internal maupun eksternal sehubungan dengan hak-hak dan tanggungjawab mereka.¹⁹ *Corporate Governance* harus dimiliki oleh setiap perusahaan, penerapan sebuah *Corporate Governance* haruslah dengan penerapan yang baik atau sering dikenal dengan istilah *Good Corporate Governance*.²⁰

Bank Syariah merupakan industri yang berkembang saat ini. Hal ini ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan

¹⁸*Ibid.*, h. 62.

¹⁹Sudarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007. h. 32.

²⁰Refki Febri Arieza dan Peni Nugraheni, *Pengaruh Penerapan Good Governance Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Komparasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2012-2015)*. Yogyakarta: Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta, h. 6.

bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. *Good Corporate Governance* pada bank syariah ini tentu memiliki hal yang berbeda dengan *Good Corporate Governance* pada institusi lainnya. *Good Corporate Governance* untuk bank syariah sendiri dikenal dengan *Good Governance Business Syariah* (GGBS). Pelaksanaan *Good Governance Business Syariah* oleh bank Syariah tercermin dalam:²¹

- a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- b) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas dan komite-komite dan fungsi yang menjalankan pengendalian internal Bank Umum Syariah.
- c) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- d) Penerapan fungsi kepatuhan, audit internal dan audit eksternal.
- e) Batas maksimum penyaluran dana.
- f) Transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan Bank Umum Syariah.

Pedoman umum *Good Governance Business Syariah* dibentuk oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2011. Komite Nasional Kebijakan Governance (2011) menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Umum *Good Governance Business Syariah* adalah

²¹Jumansyah dan Ade, Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqasid Syariah Bank Syariah di Indonesia. (Jurnal Al-Azhar Indonesia, Vol.2, No.1 (Maret 2013). h.27.

sebagai acuan dalam berbisnis secara Islami, baik untuk lembaga yang sudah menyatakan diri sebagai entitas syariah maupun yang belum.²²

2. Prinsip Dasar *Good Governance Business Syariah*

Asas GGBS yang masih sejalan dengan asas GCG yang berlaku secara umum dalam dunia usaha yaitu TARIK: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kewajaran dan kesetaraan (*fairness*).

a. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang amteril dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses keputusan.²³ Berdasarkan prinsip syariah yang ditegaskan dalam surat Al-Baqarah: 282 yang artinya: “...Dan transparankanlah (persaksikanlah) jika kalian saling bertransaksi...”, dan berdasarkan hadits yang menyatakan “... barang siapa yang melakukan ghisyy (menyembunyikan informasi yang diperlukan dalam transaksi) bukan termasuk umat kami”, maka semua transaksi harus dilakukan secara transparan. Transparansi (*transparency*) mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Konsep transparansi perusahaan harus mengungkapkan informasi terkait dengan kebijakan-kebijakan perusahaan, aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan, kontribusi perusahaan terhadap masyarakat, penggunaan sumber daya yang telah dimanfaatkan, dan upaya perlindungan lingkungan. Transparansi diperlukan agar pelaku

²²*Ibid.*, h. 6.

²³PBI No. 11/33/PBI/2009, tentang Pelaksanaan GCG Pada BUS dan UUS.

bisnis syariah menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Pelaku bisnis syariah harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan yang sesuai dengan ketentuan syariah. Oleh karena itu, maka:²⁴

- 1) Pelaku bisnis syariah harus menyediakan informasi tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
- 2) Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi organisasi, kondisi keuangan, susunan pengurus, kepemilikan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GGBS serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi entitas bisnis syariah.
- 3) Prinsip keterbukaan yang dianut oleh pelaku bisnis syariah tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan organisasi sesuai dengan peraturan perundangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
- 4) Kebijakan organisasi harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada semua pemangku kepentingan.

²⁴Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Business Syariah*,, h. 16.

b. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban dalam perusahaan, sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Jika accountability ini diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab antara pemegang saham, dewan komisaris serta direksi. Dengan adanya kejelasan maka perusahaan akan terhindar dari kondisi benturaan kepentingan peran.²⁵ Akuntabilitas merupakan asas penting dalam bisnis syariah sebagaimana tercermin dalam surat Al-Isra: 84, yang berbunyi:

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرِيضَتُكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا

Artinya: “Katakanlah setiap entitas bekerja sesuai dengan posisinya dan Tuhan kalian yang lebih mengetahui siapa yang paling benar jalannya diantara kalian”.

Dan dalam ayat 36, yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ۖ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu berbuat sesuatu tanpa pengetahuan atasnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban”.

Tanggungjawab atas perbuatan manusia dilakukan baik di dunia maupun di akhirat, yang semuanya direkam dalam catatan yang akan

²⁵Dariri, Mas Achmad, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteksa Indonesia*, (Jakarta: PT. Ray Indonesia, 2005), h. 37

dicermatinya nanti, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Isra:

14, yang berbunyi:

أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

Artinya: “*Bacalah kitabmu (laporan pertanggungjawabanmu). Cukuplah dirimu sendiri pada hari itu sebagai penghitung atas dirimu*”.

Pelaku bisnis syariah harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu bisnis syariah harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan pelaku bisnis syariah dengan tetap memperhitungkan pemangku kepentingan dan masyarakat pada umumnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan. Oleh karena itu, maka:²⁶

- 1) Pelaku bisnis syariah harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai, dan strategi bisnis syariah.
- 2) Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua elemen organisasi dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GGBS.
- 3) Pelaku bisnis syariah harus memastikan adanya sistem pengendalian yang efektif dalam pengelolaan organisasi.
- 4) Pelaku bisnis syariah harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran organisasi yang konsisten dengan sasaran bisnis yangigeluti,

²⁶Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Business Syariah*,, h. 17.

serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).

- 5) Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap elemen organisasi dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis syariah dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.
- 6) Pelaku bisnis syariah harus meyakini bahwa semua prosedur dan mekanisme kerja dapat menjamin kehalalan, tayib, ikhsan dan tawazun atas keseluruhan proses dan hasil produksi.

c. Responsibilitas

Responsibilitas adalah kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.²⁷ Dalam hubungan dengan asas responsibilitas (*responsibility*), pelaku bisnis syariah harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan bisnis syariah, serta melaksanakan tanggung-jawab terhadap masyarakat dan lingkungan. Sebagaimana firman-Nya dalam surat An-Nisa: 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia

²⁷PBI No. 11/33/PBI/2009, tentang Pelaksanaan GCG Pada BUS dan UUS.

kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Dalam usul fikih terdapat sebuah kaidah yang diturunkan dari sabda Rasulullah SAW, al-kharaj bidhdhaman yang artinya bahwa usaha adalah sebanding dengan hasil yang akan diperoleh, atau dapat pula dimengerti sebagai risiko yang berbanding lurus dengan pulangan (*return*). Dengan pertanggungjawaban ini maka entitas bisnis syariah dapat terpelihara kesinambungannya dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai pelaku bisnis yang baik (*good corporate citizen*). Prinsip tanggung jawab ini juga berhubungan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku, termasuk juga prinsip-prinsip yang mengatur tentang penyusunan dan penyampaian laporan keuangan perusahaan. Setiap peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku tentu akan diikuti dengan sanksi yang jelas dan tegas. Oleh karena itu kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku akan dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi hukum sebagaimana diatur dalam peraturan terkait, dan juga sanksi moral dari masyarakat. Oleh karena itu, maka:²⁸

- 1) Pelaku bisnis syariah harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan bisnis syariah dan perundangan, anggaran dasar serta peraturan internal pelaku bisnis syariah (*by-laws*).

²⁸Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Business Syariah*,, h. 18.

2) Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan isi perjanjian yang dibuat termasuk tetapi tidak terbatas pada pemenuhan hak dan kewajiban yang yang disepakati oleh para pihak.

3) Pelaku bisnis syariah harus melaksanakan tanggung jawab sosial antara lain dengan peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar tempat berbisnis, dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Pelaksanaan tanggung jawab sosial tersebut dapat dilakukan dengan cara membayar zakat, infak dan sadaqah.

d. Independensi

Dalam hubungan dengan asas independensi (*independency*), bisnis syariah harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Independensi terkait dengan konsistensi atau sikap istiqomah yaitu tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun harus menghadapi risiko. Dalam Al-Qur'an surat Fushshilat: 30, Allah Swt berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah" kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): "Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu”.

Independensi merupakan karakter manusia yang bijak (ulul al-bab) yang dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 16 kali, yang diantara karakternya adalah "Mereka yang mampu menyerap informasi (mendengar perkataan) dan mengambil keputusan (mengikuti) yang terbaik (sesuai dengan nuraninya tanpa tekanan pihak manapun)" (az-Zumar: 18). Oleh karena itu, maka:²⁹

- 1) Pelaku bisnis syariah harus bersikap independen dan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
- 2) Masing-masing organ Perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan dan ketentuan syariah, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.
- 3) Seluruh jajaran bisnis syariah harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan uraian tugas dan tanggung jawabnya.

e. Kewajaran dan Kesetaraan

Kewajaran adalah kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholder berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang

²⁹*Ibid.*, h. 19.

berlaku.³⁰ Kewajaran dan kesetaraan (*fairness*) mengandung unsur kesamaan perlakuan dan kesempatan. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Maidah: 8, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۖ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kamu, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Fairness atau kewajaran merupakan salah satu manifestasi adil dalam dunia bisnis. Setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai kewajaran dan kesetaraan sesuai dengan apa yang biasa berlaku, dan tidak diputuskan berdasar suka atau tidak suka. Pada dasarnya, semua keputusan bisnis akan mendapatkan hasil yang seimbang dengan apa yang dilakukan oleh setiap entitas bisnis, baik di dunia maupun di akhirat.³¹ Dalam melaksanakan kegiatannya, Pelaku bisnis syariah harus senantiasa memperhatikan

³⁰PBI No. 11/33/PBI/2009, tentang Pelaksanaan GCG Pada BUS dan UUS.

³¹Umer Chapra dan Habib Ahmed, Corporate Governanve Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008). h. 13.

kepentingan semua pemangku kepentingan, berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Oleh karena itu, maka:³²

- 1) Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan pada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan organisasi serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
- 2) Pelaku bisnis syariah harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan.
- 3) Pelaku bisnis syariah harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan pegawai, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin (*gender*) dan kondisi fisik.
- 4) Pelaku bisnis syariah harus bersikap tawazun yaitu adil dalam pelayanan kepada para nasabah atau pelanggan dengan tidak mengurangi hak mereka, serta memenuhi semua kesepakatan dengan para pihak terkait dengan harga, kualitas, spesifikasi atau ketentuan lain yang terkait dengan produk yang dihasilkannya.

3. Maksud dan Tujuan *Good Governance Business Syariah*

- a. Maksud dan tujuan penyusunan Pedoman Umum *Good Governance Business Syariah* yang selanjutnya disebut Pedoman Umum GGBS

³²Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Business Syariah*,, h. 20.

adalah sebagai acuan dalam berbisnis secara Islami, baik untuk lembaga yang sudah menyatakan diri sebagai entitas syariah maupun yang belum. Dengan dikeluarkannya pedoman ini diharapkan dapat mendorong :³³

- 1) Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat dan keberkahan dalam berbisnis.
 - 2) Pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada nilai akhlaq Islam dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.
 - 3) Kesiambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasulullah Saw.
 - 4) Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-masing organ kelembagaan dari entitas bisnis syariah yang bersangkutan.
 - 5) Kesadaran dan tanggung jawab sosial pelaku bisnis syariah terhadap kemaslahatan ummat manusia dan kelestarian lingkungan.
 - 6) Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan.
 - 7) Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatan yang universal.
- b. Pedoman Umum GGBS dikeluarkan bagi semua pelaku bisnis syariah di Indonesia, yang memuat prinsip dasar dan pedoman pokok pelaksanaan GGBS. Pedoman ini memuat standar minimal untuk ditindaklanjuti dan dirinci dalam Pedoman Sektor. Dalam pelaksanaannya diperlukan

³³*Ibid.* h. 6.

manual yang lebih operasional yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam dunia usaha dan entitas Islami.

- c. Pedoman ini juga diharapkan menjadi acuan bagi regulator dalam menyusun dan menetapkan aturan atau petunjuk pelaksanaan serta sanksi yang perlu dikenakan atas penyimpangan atau pelanggaran terhadap pelaksanaan GGBS.³⁴

4. Perbedaan *Good Corporate Governance* dengan *Good Corporate Governance Business Syariah*

Menurut KNKG (2001) tujuan utama diterapkannya GCG adalah untuk melindungi kepentingan hak dan kepentingan pemilik (pemegang saham). Hal tersebut tentunya tidak bisa diterapkan sepenuhnya untuk lembaga bisnis Syariah utamanya perbankan Syariah, karena di dalam lembaga bisnis Syariah diperlukan suatu *Good Corporate Governance Business Syariah* (GGBS) yang dapat melindungi kepentingan semua pihak yang terkait (*stakeholders*). Oleh karena itu, terdapat beberapa perbedaan antara GCG dengan GGBS. Adapun perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel.³⁵

Tabel 2.1

Pebedaan antara GCG dengan GCG Bisnis Syariah

Aspek/Kriteria	Pedoman GCG	Pedoman GCG Bisnis Syariah
Penciptaan prakondisi/situasi	Terciptanya pasar yang efisien, transparan dan	Terwujudnya bisnis yang berlandaskan pada kaidah-

³⁴*Ibid.* h. 6-7.

³⁵Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Business Syariah* (Jakarta, 2011).

yang kondusif	konsisten dengan UU yang didukung oleh 3 pilar: Negara, dunia usaha dan masyarakat.	kaidah Syariah dan berorientasi pada keberhasilan materi dan spiritual. Prakondisi spiritual untuk mewujudkan ketaqwaan. Prakondisi operasional yang didukung oleh 4 pilar: Negara, Ulama, Dunia Usaha dan masyarakat.
Asas <i>Good Governance</i>	Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran serta kesetaraan.	Dua pijakan dasar, yaitu: Spiritual yang berupa halal dan thayib. Operasional yaitu prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Kewajaran dan kesetaraan yang berlandaskan Qur'an dan Hadist.
Etika dan Pedoman Perilaku	Setiap perusahaan harus memiliki <i>core value</i> : seperti terpecaja, adil, jujur yang menggambarkan sikap moral dan etika bisnis setiap orga perusahaan dan karyawan.	Etika bisnis merupakan acuan moral demi terbentuknya akhlaqul karimah dalam berbisnis. Bisnis Syariah harus mengacu pada prinsip dasar, jujur adil amanah dan ahsan. Pelaku bisnis dapat merumuskan pedoman perilaku yang terdiri dari nilai-nilai bisnis, etika bisnis, dan pedoma perilaku bisnis Syariah

Sumber: KNKG, 2011

E. Kinerja Bank Syariah dan *Islamic Performance Index*

Pengukuran kinerja adalah suatu metode dalam pengukuran pencapaian perusahaan dengan didasarkan pada target yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini merupakan bagian dari tindakan pengendalian yang dapat membantu

perusahaan dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang selama mengidentifikasi kekurangan operasi atas kegiatan operasi dalam suatu periode. Untuk memiliki sistem pengukuran kinerja yang baik dan tepat sangatlah penting, terutama di dunia tanpa batas masa kini dimana perusahaan harus tetap kompetitif dan kuat secara keuangan. Evaluasi kinerja sangatlah dianjurkan dalam Islam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa syariah Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah muhasabah atau evaluasi.

Mengevaluasi kinerja dari institusi keuangan Islam sama pentingnya dengan mengukur pencapaian individu. Hal ini jelas bahwa peran dan tanggung jawab lembaga-lembaga keuangan Islam tidak hanya terbatas pada kebutuhan keuangan dari berbagai pihak., tetapi yang paling penting adalah bagaimana mereka menjalankan bisnis mereka dan tindakan yang digunakan untuk memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan syariah. Salah satu cara untuk mengukur kinerja organisasi adalah melalui indeks yaitu, *Islamic Performance Index*.

Islamic Performance Index merupakan alat ukur yang mampu untuk menungkapkan kinerja bank syariah. Bank Syariah tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya yang mencakup *Financial Performance* saja, melainkan pelaporan kinerja bank yang juga mencakup kepatuhan terhadap nilai syariah, kepedulian social, serta kepedulian terhadap *stakeholder*. Melalui pendekatan *Islamic Performance Index* maka akan dapat

dilihat kinerja bank syariah dari segi ekonomi maupun nilai-nilai syariah yang terdapat dalam bank syariah tersebut.³⁶

Dalam metode penilaian kinerja bank syariah, rasio keuangan yang digunakan antara lain:

1. *Profit Sharing Ratio (PSR)*

Rasio ini digunakan untuk mengidentifikasi bagi hasil yang merupakan bentuk dari seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan atas eksistensi mereka. Salah satu tujuan utama dari Bank Syariah adalah bagi hasil. Oleh karena itu, sangatlah penting untuk mengidentifikasi seberapa jauh bank syariah telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil melalui rasio ini. Pendapatan dari bagi hasil dapat diperoleh melalui dua akad, yang pertama adalah *mudharabah* yaitu penanaman dana dari pemilik kepada pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian berdasarkan *profit and loss sharing*. Akad yang kedua adalah *musyarakah* yaitu perjanjian antara pemilik modal untuk mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya, dan kerugian ditanggung semua pemilik modal berdasarkan bagian modal masing-masing.

$$PSR = \frac{\text{Pembiayaan Mudharabah} + \text{Pembiayaan Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Sumber : Shahul Hameed, 2004

³⁶Shahul Hameed,, h. 7.

2. Zakat Performance Ratio (ZPR)

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki untuk diserahkan kepada mustahiq yang pembayarannya dilakukan berdasarkan nisab dan haul yang telah ditentukan. Zakat adalah salah satu karakteristik ekonomi Islam mengenai harta yang tidak terdapat dalam perekonomian lain. Sistem perekonomian di luar Islam tidak mengenal tuntutan Allah kepada pemilik harta agar menyisihkan sebagian harta tertentu sebagai pembersih jiwa dari sifat kikir, dengki, dan dendam.³⁷

Zakat harus menjadi salah satu tujuan akuntansi syariah. Selain itu, zakat itu sendiri adalah salah satu dari perintah-perintah di dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah harus didasarkan pada zakat yang dibayarkan oleh bank untuk menggantikan indikator kinerja konvensional yaitu *Earning Per Share* (EPS). Kekayaan bank harus didasarkan pada kekayaan bersih (*net asset*) daripada net profit yang telah ditentukan oleh metode konvensional. Oleh karena itu, jika semakin besar net asset, maka bank syariah dalam menyalurkan zakat juga semakin besar. *Net asset* ialah aset bank yang terbebas dari liabilitas (utang).

Berdasarkan laporan lembaga amil zakat, perbankan syariah belum siap dalam pengelolaan zakat dan penyaluran zakat, yang tercermin pada nilai zakat performance ratio (ZPR) yang rendah. Adapun untuk menghitung Zakat Performance Ratio adalah sebagai berikut:

³⁷Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 75.

$$ZPR = \frac{\text{Zakat}}{\text{Net Asset}}$$

Sumber : Shahul Hameed, 2004

3. *Equitabel Distribution Ratio (EDR)*

Di samping kegiatan bagi hasil, akuntansi syariah juga berusaha untuk memastikan distribusi yang merata diantara semua pihak. *Equitabel Distribution Ratio* merupakan rasio yang mengukur berapa persentase pendapatan yang didistribusikan kepada *stakeholder* yang terlihat dari jumlah uang yang dihabiskan untuk qard dan donasi, beban pegawai, dan lain-lain. Untuk setiap hal tersebut, dihitung dengan menilai jumlah yang didistribusikan (kepada sosial masyarakat, pegawai, investor dan perusahaan) dibagi total pendapatan yang telah dikurangi zakat dan pajak. Dari rasio ini dapat diketahui besarnya rata-rata distribusi pendapatan ke sejumlah stakeholder.

$$EDR = \frac{\text{Qard} + \text{Beban Karyawan} + \text{Shareholder} + \text{Net Profit}}{\text{Pendapatan} - (\text{Zakat} + \text{Pajak})}$$

Sumber : Shahul Hameed, 2004

4. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment Ratio (IIR)*

Sejauh ini, prinsip-prinsip Islam melarang transaksi yang mengandung riba, gharar dan judi. Oleh karena itu, bank syariah perlu untuk mengungkapkan investasi mana yang halal dan mana yang dilarang. *Islamic Investment vs Non-Islamic Investment* merupakan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan oleh bank syariah secara keseluruhan (halal dan non halal). Dimana nilai

yang dihasilkan merupakan ukuran aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah yaitu terbebas dari unsur riba, gharar dan judi.

$$IIR = \frac{\text{Investasi halal}}{\text{Total Investasi}}$$

Sumber : Shahul Hameed, 2004

5. *Islamic Income vs Non-Islamic Income Ratio (IsIR)*

Suatu kepeertihatinan dalam praktik perekonomian saat ini adalah Islam telah secara tegas melarang transaksi yang melibatkan riba, gharar dan judi. Akan tetapi, saat ini masih banyak dijumpai praktik perdagangan yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi bank-bank syariah untuk mengungkapkan dengan jujur setiap pendapatan mana yang dianggap halal, dan mana yang dilarang dalam Islam. Bank Syariah harus menerima pendapatan hanya dari sumber yang halal. Jika bank syariah memperoleh pendapatan dari transaksi non-halal, maka bank harus mengungkapkan informasi seperti jumlah, sumber, bagaimana penetuannya dan prosedur apa saja yang tersedia untuk mencegah masuknya transaksi yang dilarang oleh syariah. Dalam laporan keuangan bank syariah jumlah pendapatan non-halal dapat dilihat dalam laporan sumber dan penggunaan qardh. Rasio ini bertujuan untuk mengukur pendapatan yang berasal dari sumber yang halal.

$$\text{IsIR} = \frac{\text{Pendapatan Islam}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Sumber : Shahul Hameed, 2004

6. AAOIFI Index

Indeks ini untuk mengukur seberapa jauh lembaga-lembaga keuangan syariah telah memenuhi prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*).³⁸

F. Penelitian Terdahulu

Ayu Widiastuti dan Mulyaning Wulan (2017) melakukan penelitian tentang “*Good Governance Bisnis Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah*”. Dengan hasil penelitian bahwa pengaruh penerapan *Good Governance Business Syariah* terhadap kinerja keuangan bank syariah di Indonesia secara signifikan memengaruhi variabel *Islamic Financial Performance Index*. Kemudian nilai probabilitas penerapan struktur dan mekanisme dewan komisaris memiliki nilai $< 0,05$ yaitu sebesar 0,002. Maka Dewan Komisaris memiliki pengaruh terhadap *islamic financial performance*, dan secara parsial nilai probabilitas struktur dan mekanisme DPS serta direksi serta informasi lainnya lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,989; 0,233; 0,065. Maka variabel DPS, direksi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *Islamic Financial Performance Index*.³⁹

Refki Febri Arieza dan Peni Nugraheni melakukan penelitian “*Pengaruh Penerapan Good Governance Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan,*

³⁸Sayekti Endah Retno Meilani, “Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah Di Indonesia*”. (Surakarta: Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015).

³⁹Ayu Widiastuti dan Mulyaning Wulan, “*Good Governance Bisnis Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah*”. (Jurnal Universitas Muhammadiyah, Vol.1 No.1 (Maret 2017), h. 94-133.

Dan Leverage Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Komparasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2012-2015)”. Dengan hasil penelitian *Good Governance Business Syariah* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (*Islamic Financial Performance Index*) pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (*Islamic Financial Performance Index*) pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia, (3) leverage tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan (*Islamic Financial Performance Index*) pada perbankan syariah di Indonesia dan Malaysia.⁴⁰

Sayekti Endah Retno Meilani (2015) “*Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah Di Indonesia*”. Dengan hasil penelitian Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah di Indonesia diketahui dari hasil perhitungan analisis kolerasi *Pearson*, didapatkan bahwa nilai Sig (2-tailed) = 0,002 karena nilai Sig (2-tailed) < 0,05 maka disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dengan *Islamic Financial Performance Index*. Hasil koefisien determinasi atau pengukuran seberapa besar hubungan penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dengan *Islamic Financial Performance Index* memperoleh nilai 26.01%. Hal ini berarti bahwa kontribusi penerapan *Good Governance*

⁴⁰Refki Febri Arieza dan Peni Nugraheni, *Pengaruh Penerapan Good Governance Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Komparasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2012-2015)*. Yogyakarta: Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Business Syariah (GGBS) terhadap peningkatan kinerja bank syariah di Indonesia sebesar 26.01%, dan sisanya sebesar 73.99% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS).⁴¹

Hexa Nur Hidayanti (2017) "*Pengaruh Intellectual Capital Dan Penerapan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamicity Performance Index*" dengan hasil penelitian, yaitu: Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa IC (VAIC) berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Dalam konteks ini, IC diuji terhadap Islamicity Financial Performance Index perusahaan dalam periode tahun 2012-2015. Berdasarkan hasil pengujian dengan PLS diketahui bahwa secara statistik bahwa hubungan variabel Intellectual Capital dengan Kinerja Keuangan berdasarkan Islamicity Performance Index menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0,749 dengan nilai t-hitung sebesar 14.078. Nilai tersebut lebih besar dari t-tabel 1,960 (t hitung > t tabel). Hal ini berarti menerima H_a atau menolak H_0 . Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah ROGIC (Rate of Growth Intellectual Capital) berpengaruh pada kinerja keuangan bank umum syariah di masa depan. Berdasarkan hasil pengujian dengan PLS diketahui bahwa secara statistik terbukti hubungan variabel ROGIC dengan Kinerja Keuangan berdasarkan Islamicity Performance Index menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.705 dengan nilai t-hitung sebesar 5.537 yang dimana nilai tersebut

⁴¹Sayekti Endah Retno Meilani, "Hubungan Penerapan *Good Governance Business Syariah* Terhadap *Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah Di Indonesia*". (Surakarta: Syariah Paper Accounting FEB UMS, 2015).

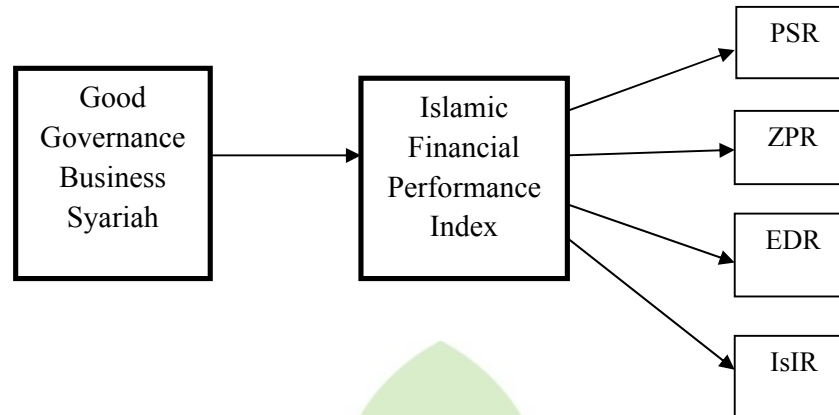
lebih besar dari t tabel 1,960 ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Hal ini berarti menerima H_a dan menolak H_0 3. Hipotesis ketiga yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa ICG berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah.

Dalam konteks ini ICG diukur melalui Syariah Compliance dan keberadaan DPS. Berdasarkan hasil pengujian dengan PLS diketahui bahwa hubungan variabel ICG dengan Kinerja Keuangan berdasarkan Islamicity Performance Index menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.50 dengan nilai t -hitung sebesar 4.394 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,960 ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Hal ini berarti menerima H_a dan menolak H_0 4. Hipotesis keempat yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa Intellectual Capital, ROGIC, Islamic Corporate Governance berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank umum syariah. Berdasarkan hasil pengujian dengan PLS diketahui bahwa hubungan variabel Intellectual Capital, ROGIC, Islamic Corporate Governance dengan Kinerja Keuangan berdasarkan Islamicity Performance Index menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.583 dengan nilai t -hitung sebesar 3.324 yang dimana nilai tersebut lebih besar dari t tabel 1,960 ($t_{hitung} > t_{tabel}$). Hal ini berarti menerima H_a dan menolak H_0 .⁴²

⁴²Hexa Nur Hidayanti. "Pengaruh Intellectual Capital Dan Penerapan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamicity Performance Index". (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayattullah, Jakarta, 2017).

G. Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Penerapan *Good Governance Business Syariah* dimaksudkan agar aktivitas ekonomi yang dijalankan benar-benar dapat mencapai tujuannya baik tujuan *hablumminallah* dan *hablumminannas*. Sejalan dengan tujuan penelitian dan kajian teori yang sudah dibahas diatas selanjutnya akan diuraikan kerangka berfikir mengenai Pengaruh Penerapan *Good Governance Business Syariah* terhadap *Islamic Financial Performance Index* Bank Umum Syariah. Variabel dependen yang digunakan adalah *Islamic Financial Performance Index* sedangkan variabel independen adalah *Good Governance Business Syariah*. Penelitian ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya Pengaruh Penerapan *Good Governance Business Syariah* terhadap *Islamic Financial Performance Index*.

H. Hipotesis

Dalam penelitian ini, penilaian terhadap *syariah compliance* dan DPS merupakan indikator dalam variabel penerapan *Good Governance Business*

Syariah dinilai dapat memperbaiki citra perbankan, melindungi kepentingan stakeholders serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan etika-etika umum pada industri perbankan dalam rangka mencitrakan sistem perbankan yang sehat. Selain itu penerapan *Good Governance Business Syariah* di dalam perbankan diharapkan dapat berpengaruh terhadap *Islamic Financial Performance Index*, dikarenakan penerapan *corporate governance* ini dapat meningkatkan kinerja keuangan, mengurangi risiko akibat tindakan pengelolaan yang cenderung menguntungkan diri sendiri. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat diturunkan hipotesis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pengaruh *Good Governance Business Syariah* terhadap *Profit Sharing Ratio*

H₀: *Good Governance Bussines Syariah* tidak berpengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_a: *Good Governance Bussines Syariah* berpengaruh terhadap *Profit Sharing Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia.

2. Pengaruh *Good Governance Business Syariah* terhadap *Zakat Performance Ratio*

H₀: *Good Governance Bussines Syariah* tidak berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_a: *Good Governance Bussines Syariah* berpengaruh terhadap *Zakat Performance Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia.

3. **Pengaruh terhadap *Good Governance Business Syariah* terhadap *Equitabel Distribution Ratio***

H₀: *Good Governance Bussines Syariah* tidak berpengaruh terhadap *Equitabel Distribution Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_a: *Good Governance Bussines Syariah* berpengaruh terhadap *Equitabel Distribution Ratio* Bank Umum Syariah di Indonesia.

4. **Pengaruh terhadap *Good Governance Business Syariah* terhadap *Islamic Income Vs Non-Islamic Income***

H₀: *Good Governance Bussines Syariah* tidak berpengaruh terhadap *Islamic Income Vs Non-Islamic Income* Bank Umum Syariah di Indonesia.

H_a: *Good Governance Bussines Syariah* berpengaruh terhadap *Islamic Income Vs Non-Islamic Income* Bank Umum Syariah di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).
- Antonio, M.S, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Anwar Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2011).
- Dahlan Siamat, “Manajemen Lembaga Keuangan”. (Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2004).
- Dariri, Mas Achmad, *Good Corporate Governance: Konsep dan Penerapannya dalam Konteksa Indonesia*, (Jakarta: PT. Ray Indonesia, 2005).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* , (Jakarta : Gramedia, 2011).
- Ghazali, Imam *Analisis Multivariate dengan Program SPSS* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006).
- Ghozali, I dan A. Chariri *Teori Akuntansi* (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2006).
- Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).
- Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, Cv. Penerbit Fajar Mulya, Surabaya, 2015.
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Umum Good Governance Business Syariah* (Jakarta, 2011).
- Malayu SP Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008).

Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006).

Modul Ekonometrika Analisis dan Pengolahan Data dengan SPSS dan EVIEWS (Bandar Lampung, 2016).

PBI No. 11/33/PBI/2009, Tentang Pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS.

Sudarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2007).

Sugiyono, *Metode Penulisan Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetak. an ke-15, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013).

Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate Governance Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi* (Pustaka Baru Press Yogyakarta, 2015).

Jurnal dan Skripsi:

Ayu Widiastuti dan Mulyaning Wulan, “*Good Governance Bisnis Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Umum Syariah*”. (Jurnal Universitas Muhamadiyah, Vol.1 No.1 (Maret 2017).

Dimas Nurdy Prasetya, *Analisis Pengaruh Intellectual Capitan terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah di Indonesia*. (Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, Semarang, 2011).

Hameed, S., A. Wirman, B. Alrazi, M. Nazli dan S. Pramono. 2004. “Alternative Disclosure and Performance Measures for Islamic Bank”. Performance Measures for Islamic Bank”.

Hexa Nur Hidayanti. "Pengaruh Intellectual Capital Dan Penerapan Islamic Corporate Governance Terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Di Indonesia Berdasarkan Islamicity Performance Index". (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayattullah, Jakarta, 2017).

Jumansyah dan Ade, Analisis Penerapan Good Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqasid Syariah Bank Syaraiah di Indonesia. (Jurnal Al-Azhar Indonesia, Vol.2, No.1 (Maret 2013).

Oktaviani Rita Puspasari,” *Mekanisme Islamic Corporate Governance Pad Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Islamic Performance Index*”. (Jurnal Universitas Kuningan, Vol. 3 No. 2 (Agustus 2017).

Refki Febri Arieza dan Peni Nugraheni, *Pengaruh Penerapan Good Governance Bisnis Syariah, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Kinerja Perbankan Syariah (Studi Komparasi Pada Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Malaysia Tahun 2012-2015)*. Yogyakarta: Universitas Muhamamdiyah Yogyakarta.

Rita Novika Sari, *Pengaruh Modal Intelektual dan Islamicity Performance Index Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia Periode 2010-2015*. (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, Lampung, 2018).

Sayekti Endah Retno Meilani, “*Hubungan Penerapan Good Governance Business Syariah Terhadap Islamicity Financial Performance Index Bank Syariah Di Indonesia*”. (Syariah Paper Accounting FEB UMS, Surakarta 2015).

Sebtianita, E, *Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Performance Index (Studi Pada Bank Umum Syariah periode tahun 2009-2013)*. Jurnal Fakultas Ekonomi UIN Malang, (April 2015).

Yesi Desiskawati, *Pengaruh Kinerja Keuangan berdasarkan Islamicity Performance Index Terhadap Pengungkapan Islamic Social Reporting (Studi Kasus Pada Perbankan Syariah di Indonesia)*, (Skripsi, 2015).

Internet:

Tentang Bank BCA Syariah (on-line), tersedia di <http://www.bcasyariah.co.id> (1 Mei 2019).

Tentang Bank BNI Syariah (on-line), tersedia di <http://www.bnisyariah.co.id> (1 Mei 2019).

Tentang Bank BRI Syariah (on-line), tersedia di <http://www.brisyariah.co.id> (1 Mei 2019).

Tentang Bank Mega Syariah (on-line), tersedia di <http://www.megasyariah.co.id> (1 Mei 2019).

Tentang Bank Muamalat Indonesia (on-line), tersedia di <http://www.bankmuamalat.co.id> (1 Mei 2019).

Tentang Bank Syariah Mandiri (on-line), tersedia di <http://www.syariahmandiri.co.id> (1 Mei 2019).